

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Subrata P. dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Anhar, Ahmad, *Yuk Keliling Dunia Gratis Melalui Program Internasional*, Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Asmara, Galang dan AD. Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, Mataram: Pustaka Bangsa, 2020.
- Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1951.
- Estikowati, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Jawa Timur: Awais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Furchan, A., *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Marshall, T.H., *Citizenship and Social Class and Other Essays*, Cambridge: Cambridge University Press, 1950.
- Muhammad, Rusli dan Hanafi, *Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1994.

- Mulia, T.S.G. dan K.A.H. Hidding, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid II, Bandung: W. Van Hoeve.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Santoso, M. Iman, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004.
- Santoso, M.I., *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012.
- Santoso, M. Imam, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Cet.1, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2017.
- Shadily, Hassan dan Pringgodigdo, *Ensiklopedia Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Verhoeven, L. dan Marcus Carvallo, *Kamus Latin-Indonesia*, Ende: Nusa Indah, 1969.
- Wijayanti, Herlin, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.

Jurnal

- Arifin, Ridwan dan Intan Nurkumalawati, "Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2, (2012).
- Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, Suharno., "Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah Dan Hubungannya Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". 2, No.1, (2023).
- Haryono, "Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan)", *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, Vol. 3, No. 2, (2017).
- Ibnu Ismoyo, "Dinamika Penanganan Kewarganegaraan dalam Perspektif Sejarah dan Kelembagaan di Indonesia: Refleksi Jelang Dua Dekade Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 23, No.2, (2026).

- Ibnu Ismoyo, "Politik Hukum Perlindungan WNI Undocumented dalam Sistem Keimigrasian Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 23, No.2, (2026).
- Joppke, Christian, "Transformation of Citizenship: Status, Rights, Identity". *Citizenship Studies*, Vol. 11, No. 1, (2007).
- Kaho, Yosep Riwu, "Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing", *Jurnal Ilmu Politik*, (1998).
- Modul Belajar Mandiri, "Pembelajaran Isu-Isu Kewarganegaraan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". Putra Publisher (2025).
- Murjani, "Prosedur Penelitian Kuantitatif", *Cross-Border*, Vol. 5, No. 1, (2022).
- Rengkuan, Natalia H.M., "Efektifitas Kinerja Pemerintah Dalam Program Reaksi Respon Relief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa", *Jurnal Governance*, Vol. 3, (2020).
- Sande, Junior Perdana, "Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa", *Indonesian Perspective*, Vol. 5, No. 1, (2020).
- Syahrin, M. Alvi., "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif-Empiris". *Majalah Hukum Nasional*, 49, No.1, (2019).
- Widodo Ekatjahjana, "Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan". *Jurnal Ilmu Hukum*, 1, No.9 (2010).
- Widyanto, Guntur dan Riri Adyaningtyas, "Kebijakan Selektif Di Bidang Keimigrasian Menghadapi Pandemi Global Covid-19", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 3, No. 2, (2020).
- Winarno, Muchtarom, Rusnaini, "Gagasan Kewarganegaraan Indonesia Dalam Perspektif Sejarah". *Jurnal Humanika*, 27, No.2, (2020).

Tesis

- Deardo Damanik, "Penarikan Status Kewarganegaraan Eks-anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) oleh Negara Asal Ditinjau Berdasarkan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan (Studi Kasus: Penarikan Status Kewarganegaraan Inggris Shamima Begum)", Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Samsul Bahri, "Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor (Studi Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)", Tesis, Universitas Medan Area, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Wawancara

Wawancara dengan Arief Eka Riyanto, Kepala Subdirektorat Pengawasan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, 12 Maret 2026.

Wawancara dengan Jauzi Zulfikar Difarry, Pejabat Fungsional pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, 12 Maret 2026.

Wawancara dengan Yan Toto Nugroho, Ketua Tim Pengembangan Aplikasi Keimigrasian, Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, 12 Maret 2026.

Internet

Code of Federal Regulations, "Part 51 - Passports." Ecfr.gov, <https://www.ecfr.gov/current/title-22/chapter-I/subchapter-F/part-51>. (Diakses 13 Maret 2026).

Commonwealth Consolidated Acts, "Australian Passports Act 2005.", Austlii.edu, https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/legis/cth/consol_act/apa2005261/. (Diakses 13 Maret 2026).

Dian Dewi Purnamasari, "Paspor Riza Chalid Dicabut, Kementerian Imipas Surati Imigrasi Malaysia." Tempo, <https://www.kompas.id/artikel/paspor-riza-chalid-dicabut-kementerian-imipas-surati-imigrasi-malaysia>. (Diakses 07 Maret 2026).

Hukum Online, "Polemik LPDP dan Blind Spot Pengawasan Keimigrasian WNI",
<https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-lpdp-dan-blind-spot-pengawasan-keimigrasian-wni-lt69d79d81ed05a/>. (Diakses 24 Juli 2026).

Singapore Statutes Online, "Passports Act 2007", SSO.AGC,
<https://sso.agc.gov.sg/Act/PA2007>. (Diakses 13 Maret 2026).

Tempo, "Penarikan Paspor untuk Mengendus Tersangka",
<https://www.tempo.co/hukum/cabut-paspor-riza-chalid-dan-jurist-tan-2078707>. (Diakses 17 Desember 2025).